BERTEOLOGI MORAL KONTEKSTUAL DI INDONESIA BERDASARKAN ETIKA KOMUNITARIAN BE'NE'ZET BUJO

Yohanes Yupilustanaji Apgrianto

ABSTRACT:

The main purpose of this article is to search for a profound understanding about the bay of doing an effective and efficient contextual moral theology in the face of a concrete social problem. To reach that goal, this article discusses the work of Benezet Bujo, an African moral theolog who tries to think about the way to do contextual moral theology in African context. Methodologically, this article starts from Benezat Bujo's critical view of the implementation of Western morality which is not obly entirely incompatible with African society, but also very often harmful to them.

Concretely, Benezet Bujo proposes an African Communitarian Ethics implementation. This article will discuss the idea of African Comunitarian Ethics more deeply and also stresses that the moral theological principles of African Communitarian Ethics help us understand the method of doing contextual theology which is more profound, efective, and efficient in the face of social problems in our society.

Kata Kunci:

Teologi Moral kontekstual, African Communitarian Ethics, Western morality.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Beberapa persoalan sosial seperti persoalan penggunaan narkoba, kekerasan dan menyebarnya penyakit HIV/AIDS menuntut adanya analisis kritis. Teologi moral semestinya terlibat secara aktif untuk memberikan refleksi kritis yang mencerahkan dalam menghadapi dan mencari solusi bagi masalah-masalah tersebut. Dengan demikian refleksi moral menjadi lebih kontekstual dan memberi dampak yang relevan serta signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Pertanyaan mendasar yang layak dijawab adalah bagaimana berteologi kontekstual yang efektif dan efisien dalam menanggapi suatu masalah sosial kontekstual? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penalaran etis/teologi moral dalam menanggapi suatu masalah sosial yang digagas oleh Bénézet Bujo. Ia adalah pemikir yang berusaha menggagas cara berteologi moral kontekstual dalam konteks Afrika dan sekaligus menyusun dasar-dasar etika Afrika dan juga dasar-dasar etika Kristiani. Secara khusus, ia memperhatikan pengembangan etika kristiani di Afrika, terutama dari sisi kebudayaan dan sejarah. Ikechukwu Odozor menyebut Bujo sebagai tokoh pelopor terbentuknya *fundamental African Catholic moral theology* (Ikechukwu Odozor 2008: 587).

Bénézet Bujo dilahirkan tahun 1940 di Drodo, Republik Kongo. Ia merupakan seorang imam Diosesan dari Keuskupan Bunia (Kongo bagian timur). Ia mendapatkan gelar doktor dari *University of Würzburg* (Jerman) dengan judul disertasi "*on the autonomy of morals and the specificity of moral norms in relation to the insights of Thomas Aquinas on moral norms*". Setelah lulus, Ia sempat mengajar selama beberapa tahun di Fakultas Teologi Katolik di Kinshasa (Kongo). Semenjak tahun 1989, ia menjadi profesor dan ketua dosen pengajar Teologi Moral dan Etika Sosial di *University of Fribourg* (Swiss). Selain itu, ia juga menjadi dosen tamu di *Catholic University of Eastern Africa* di Nairobi (B. Bujo 1997: 328).

Garis besar pemikiran Bénézet Bujo dituangkan dalam dua karya masterpiece-nya: *Foundations of An African Ethic: Beyond The Universal Claims of Western Morality dan The Ethical Dimension of Community:The African Model and The Dialogue Between North and South.* Maka, penelitian ini berfokus pada analisis

terhadap dua karya tersebut untuk memahami penalaran Bujo tentang berteologi kontekstual dan peluang untuk mengaplikasikannya dalam konteks Indonesia.

1. 2. Rumusan Masalah

Ada tiga permasalahan pokok yang hendak dijawab dari penelitian. *Pertama*, mengapa perlu merumuskan sebuah pemikiran dan langkah-langkah berteologi moral secara kontekstual? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan ditemukan dalam kritik Bujo terhadap Moralitas Barat (Western Morality) dan pemikirannya mengenai "Beyond the universal claims of Western Morality". Bagaimana melaksanakan praksis berteologi kontekstual? Jawaban terhadap pertanyaan ini tampak dalam upaya Bujo menjawab masalah-masalah konkrit di Afrika. Permasalahan ketiga adalah bagaimana menggunakan pemikiran Bujo untuk berteologi dalam konteks Indonesia? Pertanyaan ketiga ini akan penulis jawab dengan melihat kemungkinan mengaplikasikan pemikiran Bujo untuk menjawab persoalan konkrit di Indonesia.

Upaya untuk menjawab tiga permasalahan pokok di atas akan menjadi inti dari penelitian. Dengan demikian, akhir dari tulisan ini diharapkan menyajikan model bertelogi kontekstual yang lebih mendalam, efektif dan efisien, dalam menanggapi suatu masalah sosial di tengah masyarakat.

1. 3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan.

a) Penelitian ini merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan salah satu misi Program Studi Ilmu Teologi Universitas Sanata Dharama, yaitu mengembangkan kemampuan "berteologi kontekstual" (Buku Pedoman Studi Program Studi Ilmu Teologi, 2011/2012, 4).
b) Dengan mengangkat pemikiran Bujo, penulis ingin memberi sumbangan bagi praktisi dalam Gereja, khususnya Indonesia, yang ingin memahami dan mengembangkan model berteologi kontekstual.
c) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberi cakrawala lebih luas mengenai berteologi moral kontekstual dan sekaligius mendorong untuk mengaplikasikan langkah-langkah berteologi moral kontekstual untuk menanggapi persoalan nyata.

1. 4. Metode Penelitian

Teologi kontekstual adalah refleksi terhadap praksis kehidupan iman dalam situasi konkrit (JB. Banawiratma, 1995: 44-45). Langkah-langkah berteologi kontekstual adalah 1) pemahaman yang mendalam terhadap persoalan konkrit yang menjadi fokus refleksi; 2) membaca persoalan itu dengan kerangka teori tertentu; dan 3) penemuan solusi pastoral yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup beriman. Mengingat salah satu tujuan penting dari penelitian ini adalah untuk mempraktikkan refleksti teologi moral kontekstual, penelitian ini menggunakan metode refleksi kritis-dialogis kontekstual. Titik tolak refleksi adalah ungkapan dan perwujudan iman umat di dalam kehidupan sehari-hari. Dasar berteologi adalah pengalaman iman itu sendiri. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa apa yang ditulis oleh Bujo merupakan artikulasi dari pengalaman imannya.

Ada tiga langkah yang hendak penulis kerjakan dalam penelitian ini. Pertama, penulis meneliti artikulasi pengalaman iman Bujo agar dapat memahami secara mendalam pokok-pokok pemikirannya tentang teologi moral kontekstual. Kedua, penulis mencermati bagaimana Bujo mengaplikasikan penalarannya dalam konteks Afrika. Ketiga, penulis menggunakan langkah-langkah berteologi moral kontekstual Bujo untuk berteologi di Indonesia.

2. PEMBAHASAN

2. 1. Dasar-dasar Berteologi Kontekstual

Bujo mengkritik moralitas dari Barat atau "Western Morality" karena "Western Morality" telah 'menyingkirkan' berbagai macam moralitas dari negara-negara Dunia Ketiga (termasuk Afrika). Menurut Bujo, hal ini terjadi karena pengaruh globalisasi dan kolonialisasi yang telah mendorong seluruh penduduk dunia untuk mengikuti pola pikir dan tingkah laku manusia dari Barat. Dengan kata lain, globalisasi dan kolonialisasi menyebabkan keseragaman atau "universalitas" dalam pola pikir dan tindakan manusia di seluruh dunia. Melalui penyebaran dan kemajuan media massa, Dunia Barat mempengaruhi dan meyakinkan bangsa-bangsa di

belahan bumi yang lain, bahwa segala sesuatu yang baik untuk bangsa-bangsa Barat (Eropa dan Amerika Utara), mesti baik juga untuk bangsa-bangsa dan kebudayaan-kebudayaan yang lain (B. Bujo 2001: xi).

Khususnya dalam konteks Afrika, Bujo menyadari bahwa selama bertahun-tahun, cara pikir, gaya hidup dan kebudayaan Barat telah mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Afrika. Nilai-nilai tradisi dan pandangan hidup orang Afrika menjadi tersingkir dan terabaikan. Padahal, menurut Bujo, segala sesuatu dari Barat tersebut tidak sepenuhnya cocok dan bahkan kerapkali merugikan masyarakat Afrika. Misalnya, meskipun menghasilkan berbagai hal positif terkait dengan penyebaran informasi, media massa modern yang datang ke Afrika juga menyebarkan ideologi-ideologi yang "menghancurkan" nilai-nilai tradisi budaya Afrika. Oleh karena itu, Bujo mengajak masyarakat Afrika untuk bersikap kritis terhadap segala hal yang datang dari Barat. Ia meyakini bahwa penerapan "Western Morality" secara langsung dan tanpa memahami konteks budaya Afrika akan menyebabkan situasi menjadi buruk dan merugikan masyarakat Afrika (B. Bujo 1997: 11)

Dengan kata lain, Bujo menegaskan bahwa "Western Morality" tidak cukup untuk menangani berbagai persoalan masyarakat Afrika. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu moralitas yang melampaui klaim *universalitas* dari "Western Morality". Bujo menyebutnya "Beyond the universal claim of Western Morality"

Menurut Bujo yang dimaksudkan dengan "Beyond the universal claim of Western Morality" adalah usaha untuk mengangkat kembali moralitas dan etika yang berasal dari tradisi asli orang Afrika (bukan dari Barat). Dengan memahami dan mengerti moralitas dan etika dari tradisi budaya Afrika, diharapkan muncul suatu cara berteologi moral kontekstual yang lebih lebih efektif dan efisien dalam menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Afrika.

Moralitas dan etika Afrika disebut Bujo sebagai *African Communitarian Ethics* (W. Mouha Maina 2008: 192) Adapun pengertian *African Communitarian Ethics* adalah etika khas Afrika (bukan hasil rasionalitas Barat) dengan ciri komunitarian. Tujuan utama dari etika ini adalah demi kehidupan. Dengan kata lain, etika ini ditetapkan agar kehidupan setiap individu dalam komunitas dapat terjaga dan terjamin (B. Bujo 2001: 2). Penerapan *African Communitarian Ethics,* menurut Bujo, merupakan cara berteologi moral kontekstual yang paling tepat untuk konteks masyarakat Afrika.

Ciri khas utama dari etika Afrika ini adalah bahwa etika ini menempatkan komunitas sebagai pusat seluruh pelaksanaan dan penghayatan kehidupan bersama. Dengan kata lain, komunitas bertugas dan bertanggungjawab untuk menghidupi, menjaga dan melestarikan norma-norma yang disepakati bersama. Menurut Bujo, etika ini berbeda dengan komunitarianisme karena *African Communitarian Ethics* melibatkan kepentingan warga komunitas yang sudah meninggal dunia dan juga melibatkan kepentingan warga komunitas yang belum lahir (B. Bujo 2001: 9). Dengan demikian, komunitas dalam *African Communitarian Ethics* tidak hanya terdiri atas anggota klan–tradisi Afrika. melainkan juga mereka yang sudah meninggal dunia, mereka yang belum lahir dan bahkan seluruh alam semesta ini. Adapun menurut Bujo, *African Communitarian Ethics* didasari oleh tiga unsur utama yaitu, (1) Dimensi komunal dalam menghadapi persoalan bersama, (2) Tradisi *ancestral* atau tradisi penghormatan terhadap leluhur dan peranannya dalam penalaran etis serta (3) *African palaver* atau perundingan khas Afrika untuk menemukan suatu pengarahan moral (B. Bujo 2001: 65)

(a) Dimensi komunal dalam menghadapi persoalan bersama.

Bujo menerangkan bahwa setiap orang Afrika memiliki kaitan yang erat dengan komunitasnya. Mereka adalah *a community person* (Bujo 1987: 48). Selanjutnya, Bujo menjelaskan bahwa dalam komunitas orang-orang Afrika, perilaku masing-masing anggota komunitas, entah itu yang baik maupun yang buruk, akan mempengaruhi kehidupan seluruh komunitas. Tindakan baik dari seorang anggota akan mengembangkan kehidupan seluruh anggota komunitas, sedangkan tindakan buruk dari seorang anggota akan merusak kehidupan seluruh anggota komunitas. Demikian pula sebaliknya, kehidupan komunitas yang baik akan mendukung perkembangan kehidupan masing-masing anggota dan kehidupan komunitas yang buruk akan memberi penderitaan dan kerugian bagi setiap anggota (Bujo 1987: 50).

Oleh karena itu, kemalangan dan penderitaan (sakit, gempa bumi, bencana alam dan sebagainya) selalu dipandang sebagai pertanda bahwa ada relasi yang tidak beres atau buruk dalam

kehidupan berkomunitas. Dengan kata lain, setiap ada relasi yang tidak beres atau buruk dalam komunitas maka kemalangan dan penderitaan akan terjadi. Selanjutnya, komunitas meyakini bahwa orang yang tertimpa kemalangan dan penderitaan mesti dipulihkan dan disembuhkan secara komunitarian dan juga secara kejiwaan. Dunia para leluhur atau orang yang sudah meninggal dunia juga ikut dilibatkan dalam proses menanggapi kemalangan dan penderitaan yang terjadi. Hal ini karena para leluhur atau orang-orang yang sudah meninggal dunia diyakini sangat peduli pada nasib komunitas yang ada di dunia ini (B. Bujo 1997: 18).

Dari penjelasan di atas, tampaklah bahwa komunitas tidak mengijinkan seorangpun untuk hidup demi dirinya sendiri. Setiap anggota komunitas memiliki kewajiban untuk berbagi dengan anggota komunitas yang lain, baik dalam lingkup keluarga, klan maupun suku. Artinya, bahwa setiap tindakan yang dibuat oleh masing-masing anggota komunitas mesti ditujukan demi kepentingan bersama atau demi kehidupan bersama yang lebih baik. Oleh karena itu, Bujo menegaskan bahwa dalam komunitas Afrika, seorang individu tidaklah menjadi "I-for my self" tetapi harus menjadi "I-in-the-community-for-others". Dengan cara inilah, masing-masing individu menjadi pribadi yang semakin baik dan memiliki kehidupan yang lebih baik berkat dukungan dari sesamanya di komunitas (B. Bujo 1997: 16).

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa tujuan dari dinamika hidup berkomunitas ini adalah demi kesejahteraan bersama. Bujo menambahkan bahwa tujuan ini dapat tercapai jika anggota komunitas dapat terus saling mendukung dan menjaga hak-hak dan kepentingan dari masing-masing anggotanya (B. Bujo 2001: 163).

Pertanyaan yang muncul adalah: apakah individu tetap memiliki kebebasan dalam kehidupan berkomunitas? Dengan kata lain, bukankah komunitas orang-orang Afrika ini membuat kebebasan individu menjadi tidak bisa dinyatakan? Bujo memberi jawaban bahwa komunitas ini tidak menghancurkan kebebasan individu karena komunitas bertugas dan bertanggungjawab untuk membuat kebebasan individu menjadi dapat dinyatakan. Komunitas harus dapat menjaga kepentingan masing-masing individu atau anggota dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, larangan-larangan dan norma-norma yang dibangun dalam komunitas tersebut berfungsi menjaga dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan setiap individu dari segala macam tindakan kesewenang-wenangan (B. Bujo 2001: 74). Di sisi lain, masing-masing anggota atau individu juga bertugas dan bertanggung jawab untuk menyadari dan memperjuangkan kepentingan seluruh komunitasnya. Dengan demikian, seorang anggota komunitas dapat disebut bebas dalam artian bahwa kebebasannya selalu bersama dan ada dalam komunitas. . "*one does not become free outside the community but within it and through it*"(B. Bujo 1992: 7).

(b) "Tradisi ancestral" atau tradisi penghormatan terhadap leluhur dan peranannya dalam penalaran etis

Banyak suku di Afrika memandang bahwa tradisi penghormatan terhadap leluhur adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa dengan menghormati para leluhur, mereka akan mendapatkan petunjuk dan sumber kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Para leluhur adalah pendiri dan pemersatu seluruh kehidupan dan pencipta keharmonisan dalam komunitas (B. Bujo 1990: 127).

Bujo menambahkan bahwa orang-orang Afrika meyakini bahwa hidup akan menjadi penuh jika setiap individu memiliki ikatan yang erat dengan para leluhurnya. Oleh karena itu, orang-orang yang masih hidup mesti berhubungan terus dengan para leluhur. Mereka juga percaya bahwa para leluhur tetap masih hidup dalam keturunan-keturunan mereka. Para leluhur inilah yang memberi petunjuk bagi generasi penerus untuk menempuh kehidupan yang baik. (B. Bujo 1992: 48). Bujo menambahkan bahwa petunjuk-petunjuk dari para leluhur tersebut merupakan sebentuk ungkapan keprihatinan atau ungkapan pengalaman masa lampau semasa para leluhur hidup di dunia. Dari situlah, mengalir kebijaksanaan yang sangat berguna untuk menjalani kehidupan (B. Bujo 1997: 27).

Selanjutnya, orang-orang Afrika meyakini bahwa para leluhur menghubungkan mereka dengan Tuhan yang adalah Pencipta dari segala sesuatu di dunia ini. Maka wajarlah apabila, dalam komunitas orang Afrika, petunjuk dan peraturan dari para leluhur selalu lebih diutamakan daripada kepentingan masing-masing individu. Hal inilah yang mendasari komunitas untuk mengadakan upacara pemanggilan arwah leluhur saat hendak mengambil keputusan yang

penting. Mereka percaya bahwa para leluhur akan memberi petunjuk bagi mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik. Namun demikian, tidak sembarangan orang dapat menerima petunjuk-petunjuk dari para leluhur ini. Bujo mengatakan bahwa orang-orang Afrika membutuhkan seseorang yang sungguh matang, memiliki kerohanian yang mendalam dan mampu melakukan pembedaan secara teliti untuk dapat menangkap maksud para leluhur dengan tepat (B. Bujo 1998: 120).

Dengan demikian, setiap keputusan bersama dalam komunitas senantiasa diusahakan agar bisa selaras dan harmonis dengan kehendak para leluhur. Jika keputusan yang diambil oleh komunitas ternyata bertentangan dengan kehendak para leluhur, maka komunitas perlu menafsirkan kembali petunjuk-petunjuk dari para leluhur secara lebih tepat. Komunitas juga perlu mengulang kembali proses pengambilan keputusan bersama sehingga tercipta keharmonisan antara keputusan komunitas dan kehendak para leluhur (B. Bujo 1997: 71).

Selain itu, Bujo juga menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan bersama, tidak berarti komunitas hanya *meng-copy* segala ajaran, petunjuk dan teladan dari para leluhur di masa lampau. Segala ajaran, petunjuk dan teladan dari para leluhur tersebut harus didialogkan dengan situasi dan kondisi yang baru dan yang lebih kontekstual sehingga tercipta keharmonisan (B. Bujo 1998: 122).

(c) "African Palaver" atau Perundingan khas Afrika untuk menemukan suatu pengarahan moral

Bujo menerangkan bahwa *African Palaver* atau perundingan khas Afrika adalah sebuah perundingan yang bertujuan untuk mencapai keputusan bersama dan untuk menentukan norma-norma kehidupan yang penting bagi komunitas. Adapun norma-norma yang disepakati dalam *African Palaver* senantiasa terbuka untuk berubah (W. Mouha Maina 2008: 202).

Dalam *African Palaver*, orang-orang yang terlibat di dalamnya (para partisipan) saling menyampaikan pendapat dan berdialog satu sama lain terutama mengenai kehidupan mereka sehari-hari. Mereka juga saling membagikan pengalaman hidup mereka dengan mereferensi pada dua hal yaitu, (1) seluruh perjalanan sejarah komunitas dan (2) kepentingan setiap anggota komunitas baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Akibatnya, pelaksanaan *African Palaver* kerapkali membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai pada kesepakatan bersama (B. Bujo 2001: 161).

Dengan demikian, *African Palaver* bukanlah proses pembicaraan yang tidak berguna atau membuang-buang waktu saja. Hasil yang hendak dicapai dalam *African Palaver* adalah kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan komunitas. Oleh karena itu, dalam perundingan African Palaver, argumen-argumen yang diungkapkan bukan untuk saling mengalahkan, melainkan untuk saling mengoreksi satu sama lain demi tercapainya kesepakatan bersama (B. Bujo 1995: 77).

Ciri khas dari *African Palaver* adalah *komunitarian*. Artinya, bahwa norma-norma yang dihasilkan dalam perundingan senantiasa dihidupi, dijaga dan dilestarikan oleh komunitas. Demikian pula, interpretasi dan aplikasinya tergantung pada kesepakatan komunitas (B. Bujo 1995: 50). Selain itu, para leluhur mendapat tempat yang penting dalam *African Palaver*. Hal ini karena berbagai macam ajaran, aturan dan teladan dari para leluhur dipandang sangat berguna untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi kehidupan komunitas (B. Bujo 2001: 162).

Selanjutnya, Bujo menjelaskan bahwa hal yang sama antara *African Palaver* dan Etika Diskursus (berasal dari Barat) adalah bahwa kedua-duanya merupakan prosedur untuk menghasilkan norma-norma yang penting dan berguna bagi kehidupan bersama. Sedangkan perbedaannya terletak pada partisipan yang terlibat di dalamnya. Partisipan dalam *African Palaver* adalah sekelompok orang yang dipandang kompeten dan bijaksana dalam komunitas. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sungguh mengenal dan memahami kepentingan seluruh anggota komunitas. Mereka adalah orang-orang yang memiliki solidaritas dengan siapa saja yang terkait dengan komunitas. Dengan kata lain, mereka dipandang mampu untuk mewakili kepentingan seluruh anggota komunitas, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dalam perundingan *African Palaver*, mereka bertugas untuk membagikan pengalaman hidup seluruh anggota komunitas secara eksistensial. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak boleh mengecualikan dan menyingkirkan kepentingan siapapun (B. Bujo 1995: 55).

Sedangkan dalam Etika Diskursus, yang menjadi partisipan adalah mereka yang setara

secara intelektual dan yang mampu berargumen *"reasonably"* (secara rasional dan masuk akal). Oleh karena itu, Etika Diskursus kerap dikritik bahwa metode ini telah menyingkirkan dan mengesampingkan mereka yang buta huruf, yang tidak berpendidikan, yang masih kanak-kanak dan semacamnya. Meskipun demikian, Bujo berpendapat bahwa *African Palaver* perlu belajar dan berdialog dengan metode Etika Diskursus. Hal ini karena metode Etika Diskursus mampu mencegah terjadinya relativisme subyektif dalam proses penentuan kesepakatan bersama (B. Bujo 1995: 51).

Selanjutnya, Bujo menerangkan bahwa *African Palaver* tidak menolak atau menghapus posisi dan identitas masing-masing individu dalam komunitas. Bujo menunjukkan berbagai contoh kasus, di mana seorang individu dapat secara radikal menentang kesepakatan yang dihasilkan *African Palaver* (B. Bujo 1997: 51). Dalam kasus yang demikian, individu tersebut ditantang untuk berdialog dengan keluarga, klan bahkan seluruh komunitasnya. Adapun dialog ini dilakukan dengan damai dan saling mendukung dalam suatu *African Palaver* yang baru. Namun demikian, dalam kasus di mana individu bersikeras untuk berkeputusan dan bertindak yang negatif dan merugikan komunitas, maka komunitas akan memberikan sanksi yang diputuskan dalam *African Palaver* (B. Bujo 1995: 79).

Penerapan *African Palaver* telah berhasil menunjukkan bahwa norma-norma kehidupan bersama dapat ditemukan dan ditentukan secara komunal. Selanjutnya, dengan cara komunal tersebut, *African Palaver* akan mampu mencegah terjadinya dominasi dan manipulasi kepentingan (B. Bujo 1995: 37). Oleh karena itu, Bujo menegaskan bahwa model *African Palaver* inilah yang paling sesuai dan paling efisien untuk menangani persoalan-persoalan yang melanda masyarakat Afrika.

2. 2. Penerapan African Communitarian Ethics dalam KONTEKS AFRIKA

Uraian berikut ini adalah mengenai "pemikiran kontekstual" dari Bénézet Bujo, yaitu berupa cara penerapan *African Communitarian Ethics* (sebagai cara berteologi moral kontekstual dalam konteks masyarakat Afrika) dalam menanggapi berbagai persoalan konkret yang dihadapi masyarakat Afrika.

Selanjutnya, penjelasan mengenai penerapan *African Communitarian Ethics* tersebut dibagi dalam tiga bidang yaitu, (1) penerapan *African Communitarian Ethics* dalam persoalan keluarga, (2) penerapan *African Communitarian Ethics* dalam persoalan politik dan ekonomi, dan (3) penerapan *African Communitarian Ethics* dalam persoalan kesehatan (secara khusus: persoalan penyebaran HIV/AIDS).

Tradisi Afrika mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki peranan yang sama-sama penting dalam membangun keluarga. Kedua-duanya mendapat perutusan dari para leluhur untuk saling memberi dan menerima dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, tidak ada yang dari yang lain, karena kedua-duanya mempunyai tugas dan peranannya masing-masing. Akan tetapi menurut Bujo, praktek kolonialisasi dan modernisasi telah menghancurkan aspek-aspek positif dari tradisi Afrika tersebut. Sebagai contoh, pengaruh modernisasi yang menyebabkan berkembangnya praktek *migrant-labour*. Praktek *migrant-labour*, di mana para suami meninggalkan anak dan istrinya di desa untuk bekerja di kota, mengakibatkan para suami mengabaikan dan melupakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjaga dan melindungi anak dan istri. Bahkan kemudian, banyak para pengikut *migrant-labour* yang berselingkuh dan menikah lagi di kota. Selain itu, arus modernisasi cenderung me-*marginalkan* kaum perempuan dengan lebih mengutamakan peranan kaum laki-laki.

Bujo mengusulkan penerapan *African Communitarian Ethics* yaitu dengan mengangkat kembali keutamaan-keutamaan tradisi Afrika dalam membangun keluarga. Keluarga Afrika perlu kembali menghayati semangat saling memberi dan saling menerima antara suami dan istri. Baik suami maupun istri tidak boleh meninggalkan dan mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing (dalam keluarga maupun dalam komunitas). Selanjutnya, Istri mesti menghormati suami sebagai sosok pelindung dan penjamin keluarga. Suami mesti menghormati istri sebagai sosok yang luhur dan suci. Dengan demikian, keluarga-keluarga Afrika tetap lestari dan tidak hancur oleh pengaruh modernisasi (B. Bujo 1995: 129).

Dalam bidang politik dan ekonomi, tradisi Afrika menentang pengumpulan kekayaan untuk diri sendiri, termasuk jika hal tersebut dilakukan oleh pemimpin masyarakat. Kekayaan material harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh

komunitas. Oleh karena itu, masing-masing anggota komunitas mesti mempunyai semangat rela berbagi. Menurut Bujo, kolonialisasi dan modernisasi telah menghilangkan aspek-aspek positif dari ajaran tradisi ini. Masyarakat Afrika didorong untuk mengejar kekayaan ekonomi demi kepentingan pribadi. Penumpukan materi menjadi prioritas hidup sebagian besar masyarakat Afrika. Akibatnya, kesejahteraan komunitas diabaikan dan dilupakan. Akibat selanjutnya, di Afrika kini, muncul para pemimpin yang diktator. Para pemimpin ini tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat namun menghalalkan segala cara untuk menambah kekayaan pribadinya. Selain itu, warisan kolonialisme juga telah menyebabkan konflik berdarah antara negara-negara di Afrika hingga saat ini. Mereka saling memperebutkan kekuasaan dan kekayaan, tanpa memikirkan kesejahteraan bersama (B. Bujo 1995: 172). Bujo mengusulkan penerapan *African Communitarian Ethics* yaitu dengan mengangkat kembali keutamaan-keutamaan tradisi Afrika dalam hal politik dan perekonomian. Seluruh elemen masyarakat termasuk para pemimpin politik mesti mengutamakan kesejahteraan seluruh anggota komunitas. Kekayaan materi mesti digunakan untuk kepentingan komunitas dan tidak untuk kepentingan pribadi saja. Dengan mengangkat dan menghayati kembali keutamaan-keutamaan tersebut, diharapkan akan tercapai kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh anggota komunitas (B. Bujo 1995: 173).

Mengenai persoalan penyebaran virus HIV/AIDS yang merajalela di Afrika, Bénézet Bujo berpendapat bahwa era modern dengan proses industrialisasinya berperan besar dalam penyebaran virus tersebut. Era modern dan proses industrialisasi telah memutus ikatan relasi antara orang Afrika dengan komunitasnya. Orang Afrika menjadi individualistis dengan tidak lagi memperhatikan kepentingan komunitas dan lebih memperhatikan kepentingan pribadi saja. Bujo menambahkan bahwa keinginan materialistik yang tak terkendali menjadi penyebab semakin bertambahnya masyarakat yang menjadi korban HIV/AIDS. Contoh konkretnya adalah berkembangnya "pasar gelap" yang memperjualbelikan obat-obatan serta narkotika dan juga berkembangnya praktek prostitusi di Afrika (B. Bujo 1995: 187). Menanggapi usaha kampanye pemakaian kondom dari pemerintah dan juga dari para dokter, Bujo berpandangan bahwa kampanye pemakaian kondom selama ini lebih banyak bermotif bisnis dan ekonomi dibandingkan didasari oleh kehendak untuk menangani penyebaran HIV/AIDS. Selain itu, Bujo berpendapat bahwa pemakaian kondom tidak mengubah perilaku seksual masyarakat Afrika. Padahal perilaku seksual yang buruk merupakan faktor penyebab yang paling mendasar dalam penyebaran HIV/AIDS di Afrika (B. Bujo 1995: 192)

Bujo menekankan bahwa untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS, masyarakat Afrika mesti kembali menghidupi tradisi dan pandangan hidup mereka. Segala teknik pencegahan yang berasal dari Barat mesti ditanggapi dengan kritis (misalnya, penggunaan kondom, obat-obatan, dan lain sebagainya). Dengan kata lain, masyarakat Afrika mesti menghidupkan kembali kesadaran bahwa mereka bukanlah masyarakat umum, melainkan bahwa mereka adalah suatu komunitas yang merawat dan menyembuhkan. Hal ini ditegaskan Bujo dengan mengatakan ..."*to prevent the disease will remain inefficient as long as society is not taken into consideration as a "community"*... (B. Bujo 1995: 188).

Selanjutnya, Bujo menerangkan bahwa sebagai suatu komunitas, masyarakat Afrika perlu saling mendukung demi kepentingan bersama, termasuk dalam kasus penyebaran HIV/AIDS. Oleh karena itu, masing-masing anggota komunitas mesti bertugas dan bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Secara konkret, seluruh anggota komunitas mesti menyadari dan saling mengoreksi perilaku seksualnya. Perilaku seksual yang buruk dan beresiko menularkan HIV/AIDS mesti segera diubah. Dengan kata lain, masing-masing individu mesti mempertanggungjawabkan perilaku seksualnya dengan tujuan mencegah penyebaran HIV/AIDS. Selain itu, masing-masing anggota komunitas mesti bertugas dan bertanggungjawab untuk tidak melakukan hal-hal yang beresiko menularkan HIV/AIDS seperti mengkonsumsi narkoba dan mempraktekan prostitusi. Sanksi (misalnya, diisolasi dari komunitas) akan diberikan kepada siapa saja yang bersikeras melanggar kepentingan komunitas ini (B. Bujo 1995: 186).

2. 3. Berteologi Moral Kontekstual di Indonesia

Pembahasan mengenai gagasan *African Communitarian Ethics* di atas memberi sumbangan berupa pokok-pokok teologi moral yang berguna sebagai sarana yang membantu untuk memahami

cara bertelogi kontekstual yang lebih mendalam, efektif dan efisien, dalam menanggapi suatu masalah di tengah masyarakat. Adapun pokok-pokok teologi moral tersebut adalah, sebagai berikut:

(1) Untuk mencari dan merumuskan suatu pengarahan moral dan sosial, perangkat yang dibutuhkan oleh komunitas adalah: (a) Sebuah pemetaan atas suatu masalah sosial, (b) Sebuah analisa atas suatu masalah sosial dilihat dari kacamata berbagai disiplin ilmu yang terkait, yang kemudian menghasilkan rumusan pokok-pokok persoalan yang hendak ditanggapi, (c) Suatu bentuk pengarahan moral yang dapat diterima oleh semua peserta diskursus dan semua orang yang bersangkutan, (d) Segala inisiatif dari semua orang yang bersangkutan, untuk dilibatkan dalam pelaksanaan suatu pengarahan moral, dengan tujuan agar hidup bersama dapat berlangsung terus secara manusiawi.
Dari uraian tersebut, peluang gereja sebagai umat beriman adalah bahwa umat gerejani selama ini sudah dilibatkan dan melibatkan diri dalam usaha demi kepentingan bersama. Contohnya, umat gerejani yang terlibat dan bertanggungjawab dalam usaha menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari penyakit demam berdarah, di tingkat RT maupun RW. Dengan demikian, penalaran dan inisiatif (kebebasan aktif) umat gerejani sudah selalu dilibatkan pada usaha demi kepentingan umum/bersama. Sedangkan kesulitan atau tantangan yang dari-hari-ke-hari kita alami adalah bahwa sebagian masyarakat kita sedang menghadapi persoalan-persoalan menyangkut kesejahteraan hidup. Adapun contoh persoalan-persoalan tersebut adalah ketidakmampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan anak-anak sehingga banyak anak terpaksa putus sekolah dan yang kedua, ketidakmampuan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai karena biaya pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh mereka. Gereja sebagai umat beriman mendapatkan tantangan untuk terlibat dan melibatkan diri dalam usaha menanggapi persoalan-persoalan tersebut.

(2) Asas komunitarian bagi suatu penalaran moral adalah, bahwa komunitas menjadi subyek dalam menanggapi suatu permasalanan sosial. Dengan kata lain, dalam menanggapi suatu permasalahan sosial, setiap orang mesti bertugas dan bertanggungjawab dalam usaha demi kepentingan bersama. Hal ini karena manusia *de facto* selalu hidup dalam kebersamaan, sehingga setiap orang bertanggung jawab atas kebersamaan sama sebagaimana ia bertanggungjawab atas dirinya sendiri.

(3) Unsur-unsur komunitarian dalam perilaku moral adalah: (1) komunikasi, yaitu segala usaha untuk melibatkan nalar dan inisiatif (kebebasan aktif) orang lain pada kepentingan umum/bersama. Adapun usaha tersebut dijalankan tanpa mengesampingkan siapapun dan tanpa paksaan terhadap siapapun, (2) analisa suatu permasalahan sosial secara holistik, yaitu analisa permasalahan sosial dengan melibatkan analisa dari berbagai disiplin ilmu yang terkait, dengan tujuan agar didapat perumusan mengenai pokok-pokok permasalahan yang dihadapi, (3) diskursus untuk menentukan suatu pengarahan moral yang dapat diterima oleh semua peserta diskursus dan semua orang yang bersangkutan, (4) pembentukan norma-norma sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas kepentingan bersama dan (5) sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar kepentingan bersama.

(4) Peluang-peluang bagi umat beriman untuk mengusahakan penalaran moral komunitarian adalah bahwa umat beriman sudah terlibat dalam diskursus publik. Dengan kata lain, umat beriman sudah melibatkan penalaran ajaran-ajaran Kristiani dalam usaha demi kepentingan bersama. Sedangkan peluang untuk membina laku moral yang komunitarian adalah bahwa umat beriman sudah melibatkan "penalaran ajaran-ajaran Kristiani demi kepentingan masyarakat" yang berlangsung dalam tiga medan yaitu, masyarakat umum, akademi/universitas dan gereja.

Demikianlah pembelajaran atas gagasan *African Communitarian Ethics* buah pemikiran Bénézet Bujo bagi suatu cara ber-teologi moral kontekstual dalam rangka menanggapi suatu persoalan sosial.

3. PENUTUP

Hal positif dari pandangan Bujo tersebut adalah bahwa masyarakat Afrika diajak untuk bersikap kritis terhadap segala hal yang datang dari Barat. Bujo meyakini bahwa penerapan "Western Morality" secara langsung dan tanpa memahami konteks budaya masyarakat Afrika akan menyebabkan situasi menjadi makin buruk dan merugikan.

Selanjutnya, dengan gagasan *African Communitarian Ethics,* Bujo telah berhasil menunjukkan suatu sistem etika dan moralitas yang berbeda dengan "Western Morality". Dengan demikian *African Communitarian Ethics* bisa menjadi sumbangan yang penting untuk melengkapi, memperbaiki dan mengoreksi sistem etika yang selama ini berlaku: baik di Afrika, di Barat maupun di seluruh dunia.

Hal positif yang selanjutnya, dengan gagasan *African Communitarian Ethics,* Bujo telah mengangkat dan memunculkan metode *komunitarian* khas Afrika sebagai sumbangan bagi cara berteologi moral kontekstual dalam konteks masyarakat Afrika. Dengan gagasan *komunitarian* tersebut, masyarakat Afrika diajak untuk menghidupi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan berbagai kesepakatan bersama, demi kepentingan bersama/komunitas. Contohnya, dalam menghadapi persoalan penyebaran HIV/AIDS, masing-masing anggota komunitas mesti bertugas dan bertanggung jawab untuk merawat penderita HIV/AIDS dan mencegah penyebaran HIV/AIDS.

Namun demikian, Mouha Maina dalam artikelnya, *"African Communitarian Ethics in the Theological Work of Bénézet Bujo"* menyatakan bahwa pandangan Bujo mengenai *African Communitarian Ethics* tersebut telah mengesampingkan realitas keanekaragaman tradisi budaya di Afrika. Menurut Maina, penggambaran tradisi Afrika tidak bisa di-*generalisir* begitu saja karena di Afrika terdapat bermacam-macam etnis, bahasa, budaya dan latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Contohnya orang-orang *Massai* di Afrika Timur memiliki pandangan dan penghayatan hidup yang sungguh-sungguh berbeda dengan orang-orang *Gikuyu*, meski mereka berdomisili di daerah yang sama (W. Mouha Maina 2008: 207).

Maina juga mengkritik Bujo karena Ia tidak mengungkapkan sisi negatif dari tradisi kebudayaan Afrika. Contohnya, dalam praktek tradisi *Palaver* (perundingan khas Afrika untuk menemukan suatu pengarahan moral), ketidakadilan bagi kaum perempuan kerapkali terjadi. Ketidakadilan tersebut tampak nyata ketika kaum perempuan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama (W. Mouha Maina 2008: 208). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ikechukwu Odozor yang mengungkapkan bahwa pandangan Bujo mengenai komunitas dan kebudayaan Afrika cenderung berat sebelah dan kurang *komprehensif.* Odozor mengungkapkan bahwa pandangan Bujo tersebut, merupakan situasi dan kondisi yang ideal di masa lampau. Kenyataannya di masa sekarang, situasi ideal tersebut sama sekali tidak terjadi (Ikechukwu Odozor 2008: 594). Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan Bujo tersebut bersifat *"kontra faktis",* artinya pandangan tersebut merupakan situasi ideal yang tidak terjadi pada kenyataan, sehingga diperlukan usaha tertentu untuk dapat menciptakannya.

Selain itu, usulan Bénézet Bujo yang menyatakan bahwa masyarakat Afrika mesti kembali menghidupi tradisi pada masa lalu merupakan hal yang sangat sulit bahkan mustahil untuk direalisasikan. Kita menyadari bahwa tidak mungkin mengembalikan sejarah masa lampau untuk diulang kembali di masa sekarang. Yang bisa kita buat adalah mengingat dan belajar dari aspek-aspek positif tradisi masa lampau, lalu mencari relevansinya dalam konteks zaman sekarang.

Kritik selanjutnya, pandangan Bujo mengenai tempat dan peranan instrumen kedokteran, alat-alat medis dan obat-obatan (*rasional instrumental*) dalam usaha penyembuhan, tidaklah jelas. Padahal kenyataannya, dalam banyak kasus, tanpa suatu *rasionalitas instrumental*, seorang pasien tidak akan pernah dapat disembuhkan. Contohnya, kaki yang patah tetap perlu di-gips agar bisa sembuh, lalu para korban kecelakaan (yang menderita gegar otak, patah tulang, dsb) tetap perlu diberi perawatan medis secepatnya, agar nyawa mereka dapat terselamatkan, dan luka-luka mereka tidak bertambah parah.

Yohanes Yupilustanaji Apgrianto

Alumnus Program Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Pamong Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang. yupilustanaji@yahoo.com.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- buku

Bujo, B. 1992. *African Theology in Its Social Context*, Orbis Books, Maryknoll.

——— 1997. *The Ethical Dimension of Community; the African Model and the Dialogue between North and South*, Paulines Publications, Nairobi.

——— 1998. *African Christian Morality at the Age of Inculturation*, Paulines Publications Africa, Nairobi.

——— 2001. *Foundations of an African Ethic: Beyond the Universal Claims of Western Morality,* The Crossroad Publishing Company, New York.

Banawiratma, JB., 1995. *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*, Kanisius, Yogyakarta

——— Pedoman Studi Program Studi Ilmu Teologi, 2011.*Berteologi Kontekstual*, Program Studi Ilmu Teologi, Fakulultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

2. Artikel-artikel

Bujo, B. 1987. "Solidarity and Freedom: Christian Ethic in Africa", Theology Digest 34, 49-61.

——— 1990. "Eucharist in Black African Perspective", Theology Digest 37, 127-141.

Ikechukwu Odozor, P. 2000. "African Moral Theology of Inculturation: Methodological Considerations", Theological Studies 69, 583-609.

Masenya, Madipoane, 2004. "HIV/AIDS and African biblical hermeneutics: Focus on Southern African Women", *Chakana: Afrikanische Theologie*, Choe Hyondok (ed), Frankfrut, 21-35.

Mouha Maina, W., 2008. "African Communitarian Ethics in the Theological Work of Bénézet Bujo", Pacifica 21, 192-209.